

Bisnis Indonesia

Wake Up Call

Membangun Whistleblowing System yang Efektif

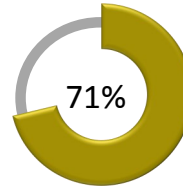
Saya adalah ketua pilot project untuk penerapan whistle-blowing system. Bisakah RSM AAJ memberikan informasi bagaimana membangun whistleblowing system yang efisien dan efektif?

Saat ini, bukan hanya organisasi atau perusahaan multinasional yang setiap hari menghadapi risiko. Risiko dihadapi oleh semua organisasi dan perusahaan, mau itu organisasi dengan skala kecil, menengah maupun besar. Dengan semakin meningkatnya kejahatan kerah putih di berbagai tempat, berbagai organisasi dan institusi telah mengambil tindakan pencegahan melalui penguatan tata kelola yang baik (*good governance*) dan salah satunya adalah dengan memastikan adanya Sistem Whistleblowing (WBS) yang efisien dan efektif. Sebuah sistem yang dapat mencegah dan mendeteksi pelanggaran, malpraktik, dan salah pengelolaan (*mismanagement*), serta juga dapat melindungi dan menjaga reputasi organisasi harusnya diterima dengan tangan terbuka. WBS bermanfaat sebagai fungsi pengawasan sekaligus pencegahan pelanggaran. Sebagai alat pengawasan, *whistleblowing* memfasilitasi pelaporan indikasi pelanggaran, dan sebagai alat pencegahan, *whistleblowing* menjadikan pengawasan sebagai salah satu budaya, sehingga apabila orang tergoda untuk melakukan pelanggaran, dia akan berpikir ulang karena tahu siapa yang mengawasinya di luar sana. WBS yang efektif dapat mendorong partisipasi dari semua pihak terkait di lingkungan perusahaan untuk mau terlibat. Ini berarti WBS dapat mengurangi budaya “diam” dan merubahnya menjadi budaya “jujur dan terbuka”.

Otoritas Jasa Keuangan pun dalam dokumen Roadmap Tatakelola Perusahaan Indonesia menuliskan bahwa praktik keteladanan internasional di bidang tata kelola mendorong perusahaan untuk memiliki kebijakan *whistleblowing* dan pengungkapan implementasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan yang ada perlu diperkuat untuk mendorong Emiten atau Perusahaan Publik agar memiliki kebijakan dimaksud dan menjelaskannya apabila tidak dapat mematuhi (*comply or explain*). Ketentuan yang mendorong Emiten dan Perusahaan Publik untuk memiliki sistem *whistleblowing* tersebut rencananya dimuat dalam Pedoman GCG Emiten dan Perusahaan Publik pada Juni 2015.

WBS yang efektif membutuhkan adanya struktur dan proses yang memadai, karena pelapor ingin merasa aman dan merasa terjamin pada saat dia memutuskan untuk melapor. Perlu diingat bahwa dibutuhkan keberanian yang besar bagi siapapun untuk menyampaikan informasi pelanggaran – apalagi bila itu terjadi di dalam organisasi dimana dia berada.

Dari sisi struktur, tentunya perlu dukungan yang kuat dari pimpinan perusahaan, sehingga benar-benar terasa kesungguhan penguatan *good governance*, baik dari sosialisasinya, muatan kebijakannya, juga aktivitas penegakannya. Dari sisi proses, perusahaan harusnya memfasilitasi pelaporan itu melalui mekanisme yang mudah misal-



Tidak Mengungkapkan

352 dari 494 emiten dan perusahaan publik tidak mengungkapkan apakah perusahaan telah memiliki kebijakan whistleblowing

Sumber: Roadmap Tatakelola Perusahaan Indonesia, 2014

nya melalui aplikasi berbasis web sehingga pelaporan dapat dilakukan kapan saja bahkan dengan menggunakan *smartphone*, dan juga melalui pihak yang terpercaya.

Pihak yang terpercaya ini bisa merupakan personil di dalam perusahaan, maupun pihak independen di luar perusahaan. Menunjuk personil di dalam bertanggung jawab untuk menerima pengaduan atau pelaporan WBS memang *cost-efficient* namun risiko kebocoran laporan dan identitas pelapor lebih tinggi, belum lagi eksposur risiko ancaman yang dihadapi personil tersebut. Dilain sisi, banyak orang menaruh kepercayaan lebih apabila WBS dikelola oleh pihak yang independen dari organisasi tersebut. Berdasarkan diskusi saya dengan beberapa perwakilan dari beberapa organisasi, banyak yang merasa lebih nyaman dan merasa lebih terjamin dari potensi kebocoran informasi saat mereka melapor kepada pihak independen ketimbang melapor kepada koleganya sendiri.



RSM AAJ

Audit • Tax • Advisory

KEY POINTS

- Perlu ada dukungan penuh dari pimpinan baik itu dalam sosialisasi, muatan kebijakan yang mendorong pelaporan, serta dalam penindakan.
- Proses pelaporan dibuat *simple* dan tidak menyulitkan pelapor.
- Akses terhadap media pelaporan dibuat mudah dijangkau.



Angela Indirawati Simatupang
MCom, CIA, CRISC, CRMA
Managing Partner
Governance Risk Control Practice

Globally connected. Strong knowledge on Indonesia.

Wake Up Call adalah kolom konsultasi yang dikhususkan untuk pertanyaan seputar audit, akuntansi, perpajakan, keuangan, tata kelola, manajemen risiko, audit internal dan pengendalian internal. Pertanyaan dapat ditujukan ke wakeupcall@rsmaaj.com. RSM AAJ adalah anggota RSM di Indonesia, sebuah network kantor akuntan dan konsultan terbesar ke-7 di dunia. Di Indonesia, RSM AAJ berada di peringkat 5 besar. Kami memiliki lebih dari 730 kantor di lebih dari 110 negara, didukung oleh lebih dari 37.500 staf dengan lebih dari 3.000 *partner*.

www.rsmaaj.com

